

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Apriyanto Nusa & Ramdhan Kasim, 2019, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas & Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Malang: Setara Press
- Andi Sofyan & Abd Asis, “*Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*” PT Rangkang Education: Yogyakarta., 2013
- Alfi Fahmi, *Ensiklopedia Indonesia*, Media Press Indo, Jakarta, 2002
- Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Analisis dan evaluasi hukum tentang putusan pengadilan militer dalam perkara koneksitas* Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1996
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Faisal Salam, “*Peradilan Militer di Indonesia.*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2016
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2006
- Sumaryanti, *Peradilan Koneksitas di Indonesia: Suatu Tinjauan Ringkas*. Jakarta, Bina Aksara, 1987

Tim KPK Memahami Untuk Membasmi: *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2006

Sumber Internet :

<http://www.kajianpustaka.com/2013/08/pengertian-model-bentuk-jenis-korupsi.html> diakses tanggal 3 Desember 2023 Pukul 20.18 WIB

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Ketentuan Hukum Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Undang-Undang 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman